

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* DALAM
IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT 4 HURUF H
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

**IKKE RAPIKA ESA BELLA
NPM : 1921020106**



Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* DALAM
IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT 4 HURUF H
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syar'iah dan Hukum

Oleh :

IKKE RAPIKA ESA BELLA

NPM : 1921020106

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S. Sos., M.H

Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pemerintah Desa merupakan sebuah unsur penyelenggaraan pemerintah yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”. Dan di dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 26 Ayat 4 Huruf H menyatakan bahwa “Pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik”. Namun yang dirasakan malah sebaliknya yaitu belum teratasi dengan baik dan jauh dari sebagaimana yang diharapkan.

Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah Bagaimana implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan untuk menganalisis tinjauan *Fiqh Siyasah tanfidziyah* Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode Pengelolaan data menggunakan reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana. Pemerintah desa telah berupaya menjalan

perannya yaitu dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat dalam membantu mengurus keperluan administrasi terkait surat menyurat yang diperlukan oleh masyarakat. Berdasarkan pandangan *Siyasah Tanfidziyah* bahwa pelaksanaan pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai *Siyasah Tanfidziyah* yang merupakan pelaksana undang-undang.

Kata kunci : *Fiqh Siyasah, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Pemerintah Desa, Undang-Undang Desa*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikke Rapika Esa Bella
Npm : 1921020106
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasa* *Tanfidziyah* Dalam Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya,

Way Tenong,

Penulis, 29 Juli 2023



IKKE RAPIKA ESA BELLA

NPM. 1921020106



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT 4 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).**

Nama : **Ikke Rapika Esa Bella**
Npm : **1921020106**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ilky Faizal, S.Sos., M.H
NIP. 197611042005011004


Uswatun Hasanah, M.Pd
NIP.

Ketua Jurusan


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Fiqh Siyasaah Tanfidziyah Dalam Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**" Disusun oleh Ikke Rapika Esa Bella, NPM: 1921020106, Program Studi Hukum Tata negara (*Siyasaah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada hari/tanggal: Selasa, 12 September 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Sucipto, S.Ag. M.Ag.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾ (ص/٣٨: ٢٦)

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

(Sad/38:26)





PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikut yang taat pada ajaran agamanya. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga maka dengan tulus serta rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Rindang Alam dan Ibunda Sinuria yang tak henti-hentinya memberikan dukungan doa terbaik, moril, materi dan kasih sayang yang tulus untuk cita-citaku. Terimakasih untuk orang tuaku yang selalu berjuang untuk kehidupan anaknya menjadi lebih baik, sehingga anaknya bisa berada dititik ini dan menjadi pribadi yang sekarang. Semoga dengan skripsi ini, dapat menjadi salah satu pengantar untuk terus membanggakan orang tuaku.
2. Adikku tersayang Syirin Avrizka yang selalu menjadi penyemangat terbaik, terimakasih atas semua dukungan, doa dan kasih sayangnya kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adikku. Dan terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang turut memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dengan imam, ilmu sehingga mendewasakan dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ikke Rapika Esa Bella dilahirkan pada tanggal 24 juni 2000 di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dari pasangan ayahanda Rindang Alam dan Ibunda Sinuria.

Penulis mengawali pendidikan di Taman kanak-kanak Merpati Emas pada tahun 2005-2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 03 Kembang Tanjung pada tahun 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Abung Selatan pada tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Way Tenong, 29 Juli 2023

Penulis,



Ikke Rapika Esa Bella
NPM. 1921020106

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya dan tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Dalam Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan universitas maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.

7. Kepada pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dinas Penanamann Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkhusus Bapak Drs. Daman Nasir, M.P. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Kepada pihak Pemerintah Desa dan Warga Desa Sukananti terkhusus Bapak Alfi Yulizon selaku Kepala Desa Sukananti yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Kepada diriku sendiri Ikke Rapika Esa Bella, terimakasih karena telah mampu berusaha dan berjuang untuk bertahan sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan baik dari luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses selama ini dan tetap melangkah dalam berbagai rintangan dalam hidup. Pesan buat kamu yang perlu kamu adalah aku bangga dan bersyukur atas dirimu selama ini dan saat ini ikke.
10. Kepada nenek dan kakek yaitu Mat Aswi, (Alm) Sauma, (Alm) Badari dan (Alm) Samaliu terimakasih sudah ada dan mendampingi dalam perjalanan hidupku selama berkuliah di UIN Raden Intan Lampung.
11. Kepada Cik Ibar, Mamang Iron, Wak Diana, endis yani, endis ramai, bibi Mau, bibi Teri, terimakasih sudah memberi dukungan, perhatian dan doa terbaik untuk kelancaran pendidikan ponakannya ini dalam meraih cita-citanya.
12. Kepada Iis Dahlia teman, sahabat dan rekan sekaligus kelurgaku selama di perantauan yang hampir selalu ada dalam cerita perjalan kuliah, suka maupun duka, terimakasih sudah ada dan mendampingi selama berkuliah di UIN Raden Intan Lampung.
13. Kepada kawan-kawan seperjuanganku Dwi, Nurmia, Anisa Wijayanti, Nova, Lutfi, Tirta, Inayah, Intan, Anisatus, Via, Qotrun terimakasih kebersamai selama berkuliah di UIN Raden Intan Lampung.
14. Seluruh Keluarga besar Kelas HTN B 2019, Mahad Al-Jamiah angkatan 2019, dan UKM Puskima serta GENBI angkatan 2022.
15. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT.

Aamin yarobbal alamin.

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu keislaman.

Way Tenong, 29 Juli 2023

Penulis,



Ikke Rapika Esa Bella
NPM: 1921020106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul.....	1
B. Latar belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	22
B. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	24
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	24
2. <i>Al Sultah Tanfidziyah</i>	25
C. Peran Pemerintah Desa	28
1. Pengertian Pemerintah Desa	28
2. Peran Pemerintah Desa.....	29

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	30
D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	36
1. Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	36
2. Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat	45
B. Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.....	51

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat	59
B. Analisis Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Sejarah Kepemimpinan Peratin Pekon Sukananti
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Pekon Sukananti
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Pekon Sukananti
Tabel 3.4 Prasarana Pendidikan Pekon Sukananti
Tabel 3.5 Jumlah Pemeluk Agama
Tabel 3.6 Prasarana Tempat Ibadah Pekon Sukananti
Tabel 3.7 Pertanian Pekon Sukananti
Tabel 3.8 Peternakan Pekon Sukananti
Tabel 3.9 Mata Pencarian Pekon Sukananti
Tabel 3. 10 Perangkat Desa
Tabel 3. 11 Lembaga Kemasyarakatan



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari sebuah kesalahpahaman maka penulis merasa sangat perlu adanya penegasan judul skripsi ini. Judul skripsi yang dimaksud adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* dalam Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).”** Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh.¹

2. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh Siyasah Tanfidziyah adalah politik pelaksanaan undang-undang.²

3. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.³

4. Pasal 26 Ayat 4 Huruf H

Berdasarkan Pasal 26 Ayat 4 Huruf H di dalamnya melaksanakan tugasnya menyatakan bahwa “Pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik”.⁴

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹ Zhamrawut Corps Indonesia, “Definisi Dan Arti Kata Tinjauan,” Kamus Hukum Online Indonesia, 2016, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan/>.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) 33.

³ Ebta Setiawan, “Arti Kata Implementasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012, <https://kbbi.we.id/implementasi>.

⁴ Pasal 26 Ayat (4) Huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa yang disahkannya oleh Presiden Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014.⁵

6. Desa

Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan judul skripsi “Tinjauan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* dalam Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” merupakan suatu pemeriksaan aturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap desa dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang *good governmen*.

B. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari pelayanan, karena dalam rangka mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan yang dibutuhkan manusia pada dasarnya dua jenis, yaitu layanan fisik yang bersifat pribadi sebagai manusia dan layanan *administrative* yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau negara. Pemerintah desa berperan penting dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶ Erni Iraawati, “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Sebuah kajian tentang Otonomi Desa),” *Jurnal: Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2021): 635, <https://stp-mataram-e-journal.id/JIP/article/view/719/588>.

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”⁷

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. Tetapi pada kenyataannya pelayanan publik oleh aparat pemerintah desa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.⁸ Dan di dalamnya melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 26 Ayat 4 Huruf H menyatakan bahwa “Pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik”.⁹

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi ialah berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

⁸ Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹ Pasal 26 Ayat (4) Huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

publik.¹⁰ Bentuk dokumen sendiri yang sering dibuat masyarakat ke desa adalah sbb:

1. Surat Pernyataan
2. Surat Keterangan Kelahiran
3. Surat Keterangan Kematian
4. Surat Keterangan Ijin Rame-rame
5. Surat Keterangan Belum Menikah
6. Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Surat Keterangan Serbaguna
8. Surat Keterangan Duda Janda
9. Surat Keterangan Usaha
10. Surat Keterangan Berkelakuan Baik
11. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
12. Surat Keterangan Domisili Individu¹¹

Ilmu administrasi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yaitu dalam bidang pembangunan, negara, niaga, hukum dan bidang sosial. Dalam perspektif Islam, administrasi dikenal dengan istilah *al-idarah*. Administrasi dalam Islam merujuk kepada Al-Qur'an dan tafsirnya serta hadist dan syarahnya. Sumber-sumber tafsir memberikan suatu penjelasan terhadap isyarat-isyarat Al-Qur'an yang posisinya melebihi kaidah umum yang berkaitan dengan tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan publik, pelayanan prima sebagai suatu keharusan dan kewajiban baik bagi pemerintah maupun aparatur sipil negara. Pelayanan publik yang dilakukan berpodoman pada ajaran Islam yaitu pelayanan yang dilakukan harus baik, jujur, berkualitas dan amanah. Namun pada masa Rasulullah, ilmu administrasi belum begitu sempurna. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah

¹⁰ Gradila Apriani, Shelly Oktafiyana SR, "Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan," *Jurnal Fisip*, Volume 19 Nomor 1 (April 2021): 113, <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/486>.

¹¹ Yulianti Sibaroni, *Aplikasi Pelayanan Administrasi Penduduk Desa Berbasis Web Programing* (Yogyakarta: SNATi, 2015), 1907–5022.

Nabi yang *ummi* yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Allah Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157)

Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, aktivitas membaca dan menulis mulai dilakukan dikalangan kaum muslimin, terutama dikalangan para *shahabiyah*. Nabi Muhammad SAW membangun suatu pemerintahan berlandaskan syari'at Islam di Madinah, sistem administrasi yang jelas dan rapi. Dengan demikian penekanan pada bidang pendidikan khususnya pada aktivitas membaca dan menulis mulai dilakukan sehingga lahirlah arsip pertama dalam sistem pemerintahan Islam dalam bentuk perjanjian yang dikenal dengan

Piagam Madinah pada tahun 1 Hijriah yang berisi 47 pasal tentang peraturan-peraturan dan hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah.

Penerapan sistem administrasi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah belum diterapkan sebagaimana mestinya karena sistem administrasi belum dijalankan dengan baik, sehingga para sahabat Nabi Muhammad SAW mendapatkan cobaan berupa intimidasi yaitu teror, cacian, penyiksaan dan penganiayaan dilakukan oleh pembesar Mekkah termasuk Nabi sendiri merasakan intimidasi tersebut.

Meskipun terjadi berbagai intimidasi, Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan administrasinya di Mekkah disuatu tempat yang bernama *Darul Arqom*.¹²

Penjelasan diatas memberikan gambaran bagaimana seharusnya pemerintah desa dalam memberikan layanan administrasi kepada masyarakat, namun dalam kenyataannya hal tersebut belum bisa berjalan dengan baik seperti yang terjadi di desa sukananti. Pemerintah desa belum sepenuhnya dapat melaksanakan pelayanan administrasi, Yang mana seharusnya pemerintah sebagai *service provider* (penyedia jasa) bagi masyarakat dapat memberikan pelayanan administarasi yang baik, namun yang dirasakan malah sebaliknya yaitu belum teratasi dengan baik dan jauh dari sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Lemahnya ketepatan waktu proses pelayanan publik yang diberikan petugas pelayanan kepada masyarakat sehingga menyebabkan pelayanan administrasi di desa sukananti belum bisa maksimal yang mana hal ini mempengaruhi kinerja perangkat desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat sehingga membuat proses pengajuan permohonan pelayanan administrasi yang

¹² Nanda Herijal Putra, "Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab Public Administration In Islamic Perspective: A Study On The Government System Of Umar Bin Khattab," *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Volume 8 Nomor 1 (Juni 2021): 18-22, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/3541/1801>.

dilakukan oleh masyarakat desa sukananti tertunda dan *professional* perangkat desa tersebut dipertanyakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqih Siyasaah Tanfidziyah* dalam Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).”

C. Fokus Dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dan sub fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Sub fokus penelitian ini adalah, sebagai berikut :
 - a. Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - b. Tinjauan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah* Dalam Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pelayanan Administrasi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana *Tinjauan Fiqih Siyasaah Tanfidziyah* Dalam Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk menanalisi Tinjauan *Fiqih Siyasa Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil peneliti untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dari peneliti yang sesuai dengan bidang ilmu peneliti. Selain daripada itu penulis berharap hasil dari penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik Tinjauan *Fiqih Siyasa Tanfidziyah* dalam Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan diharapkan bisa menjadi *referensi* bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas *Syariah*.

2. Secara Praktis

Sebagai informasi kepada masyarakat dalam memperluas wawasan pola pikir khususnya yang berhubungan tentang Desa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya sebuah plagiasi antara skripsi ini dengan skripsi yang lainnya, terlebih dahulu penulis mencari-cari bahan sebagai contoh guna menjadi referensi pada penelitian ini. Dalam kajian penelitian terdahulu yang relevan ini penulis

menemukan beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vina Susana pada tahun 2020, program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.” Adapun hasil penelitian ini bahwa menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan. Meskipun ada kendala dalam pelayanan administrasi berupa tidak adanya kantor keuchik, namun pelayanan administrasi tetap terjadi di rumah keuchik atau di rumah sekretaris desa. Adapun sistematika pelayanan administrasi masyarakat adalah harus menjumpai keuchik atau sekretaris desa terlebih dahulu. Selanjutnya keuchik mengarahkan masyarakat untuk menjumpai sekretaris desa dan kemudian meminta tanda tangan keuchik sekaligus stempel desa.¹³

Pada penelitian karya Vina Susana tersebut secara teori terdapat kesamaan tentang Peran Pemerintah dalam Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat dengan skripsi ini. Sedangkan untuk perbedaannya dalam skripsi penelitian ini adalah Peneliti menggunakan tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*, dan lokasi yang penulis pilih berbeda dengan karya Vina Susana.

2. Skripsi yang ditulis Kornelis Ndara Mali pada tahun 2022, program studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tungadewi. Skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Adapun hasil penelitian ini bahwa Upaya yang dilakukan penguasa Desa Kambingan dalam melayani kebutuhan masyarakat khususnya, dengan terus menerus

¹³ Vina Susana, “Peran pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

memberikan informasi kepada masyarakat, selain itu juga mengayomi penduduknya di segala usia dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat Desa Kambingan dapat menikmati kemudahan pelayanan administrasi pemerintah Desa. Yang mana tugas utama pemerintah Desa Kambingan dalam mengembangkan pelayanan terhadap masyarakat adalah mendorong dan membina hubungan baik antara lembaga atau instansi dengan publik interen maupun eksteren, dalam menanamkan pengertian, mengembangkan inspirasi dan dukungan publik dengan membuat inspirasi serta kerjasama publik dalam menciptakan iklim pelayanan yang baik. Serta variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Desa Kambingan dalam menyelesaikan pelayanan ialah; berupa sarana maupun prasarana yang kurang memadai serta hambatan yang berasal dari masyarakat karena tidak adanya waktu luang masyarakat sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Selain itu, belum adanya SDM yang berkompeten bidang pelayanan masyarakat di Desa Kambingan.¹⁴

Pada penelitian Kornelis Ndara Mali terdapat kesamaan dalam membahas Pelayanan Bagi Masyarakat dengan skripsi ini. Sedangkan untuk perbedaannya dalam proposal peneliti ini yang peneliti teliti adalah Dalam skripsi Kornelis Ndara Mala membahas tentang Upaya Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas Tinjauan *Fiqih Siyash Tanfidziyah* Dalam Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).

¹⁴ Kornelis Ndara Mali, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang" (Skripsi, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2022).

3. Skripsi yang ditulis oleh Erdipa Panjaitan pada tahun 2018, program studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area. Skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat di Kantor kepala Desa Aek korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun hasil penelitian ini bahwa kualitas pelayanan administrasi di Kantor Kepala Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan batu Utara sudah menerapkan dimensi *Tangible*, *Reliability*, *Responsiviness*, *Assurance*, dan *Emphaty* beserta indikatornya. Namun masih ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain ketidaknyamanan tempat pelayanan termasuk sarana dan perasarana yang belum lengkap, pegawai belum efektif menggunakan SOP (Standart Operasional Prosedure) dalam proses pelayanan, dan masih ada pegawai yang tidak ramah dalam proses pelayanan.¹⁵

Pada penelitian Erdipa panjaitan terdapat kesamaan dalam membahas pelayanan administrasi. Sedangkan untuk perbedaannya dalam skripsi peneliti ini adalah Peneliti menggunakan tinjauan *Fiqih Siyasa Tanfidziyah* dalam teori Peran Pemerintah dalam Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat, lokasi yang peneliti pilih berbeda dengan skripsi Erdipa Panjaitan yang membahas tentang Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat di Kantor kepala Desa Aek korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Annisa pada tahun 2014, program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” Adapun

¹⁵ Erdipa Panjaitan, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kepala Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2018).

hasil penelitian ini bahwa pemerintah Desa Bontoramba tidak bekerja sesuai dengan prosedur kerja dikarenakan pelayanan yang dilakukan pada malam hari serta pelaksanaan pelayanan administrasi dilakukan di rumah masing-masing aparat desa sehingga membuat warga merasa dipersulit serta sarana dan prasarana yang ada di kantor desa untuk pelayanan administrasi sudah lengkap. Hal ini dapat dilihat dari adanya kursi dan meja kerja, lemari serta kelengkapan lainnya.¹⁶

Pada penelitian Nur Annisa terdapat kesamaan dalam pembahasan pelayanan administrasi. Sedangkan untuk perbedaannya dalam skripsi peneliti ini adalah Peneliti menggunakan Tinjauan *Fiqih Siyasa* Tanfidziyah dalam teori pelayanan administrasi serta lokasi penelitian yang berbeda dengan skripsi oleh Nur Annisa yang membahas Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

5. Skripsi yang ditulis oleh Norma Setiyana pada tahun 2021, program studi Hukum Tatanegara, Universitas Raden Intan Lampung. Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam.” Adapun hasil penelitian ini peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah terlaksana di Desa Jatibaru melalui Surat Edaran Bupati Lampung Selatan, hanya saja belum terimplementasi secara maksimal sebagaimana faktor yang menghambat terimplementasinya peraturan tersebut. Dalam pandangan hukum Islam peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jatibaru sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena telah berusaha untuk

¹⁶ Nur Annisa, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014).

mengimplementasikan PP 21/2020 PSBB. Peran-peran tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19.¹⁷

Pada penelitian Norma Setiyana terdapat kesamaan dalam Peran Pemerintah Desa, sedangkan untuk perbedaannya dalam skripsi ini yang peneliti teliti adalah Peneliti menggunakan Tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* dalam teori Peran Pemerintah Desa serta lokasi penelitian yang berbeda dengan skripsi karya Norma Setiyana Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam.

6. Jurnal yang ditulis oleh Yani Alfian, Program studi Manajemen Sumber Daya Aparatur, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jurnal yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat. Adapun hasil jurnal ini adalah upaya dilakukan oleh pemerintah desa Ciharashas kecamatan Cipeundeuy dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan menginstruksikan kepada bawahannya untuk selalu menjunjung tinggi transparansi proses pelayanan publik, menjamin kepastian hukum dari hasil produk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak memiliki rasa cemas, dalam menjalankan proses pelayanan publik selalu memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan hak dan kewajiban antara masyarakat selaku pengguna layanan publik dan pemerintah desa selaku penyedia pelayanan publik.¹⁸

Pada Jurnal Yani Alfian terdapat kesamaan dalam membahas peran pemerintah desa. Sedangkan untuk perbedaannya dalam skripsi peneliti adalah pelayanan

¹⁷ Norma Setiyana, "Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁸ Yani Alfian, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat," *Jisipol*, *Volime 3 Nomor 1* (2019): 59–69.

administrasi bagi masyarakat yang peneliti, lokasi dalam penelitian serta peneliti juga menggunakan *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

7. Jurnal Musdar, Samiruddin Tarwan, dan Andi Syahrir pada tahun 2022. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia. Jurnal yang berjudul Peranan Perangkat Desa dalam Pelayanan Surat-Menyurat (Studi di Desa Pallimae Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana). Adapun hasil jurnal ini adalah Penelitian menunjukkan bahwa dari 12 jenis surat yang diuraikan terdapat 8 jenis surat yang terlaksana terdiri dari surat keterangan lahir, surat keterangan menikah, surat pengantar surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan domisili, surat pengantar perkawinan, surat keterangan belum menikah, surat keterangan tidak mampu dan surat permohonan kartu keluarga warga negara Indonesia. Selain itu ditemukan juga beberapa surat keterangan lainnya seperti surat keterangan usaha, surat keterangan kematian, surat keterangan penghasilan orang tua, surat keterangan mahar, surat keterangan jual beli, surat keterangan pindah datang Warga Negara Indonesia dan surat keterangan bebas sengketa.¹⁹

Pada jurnal Musdar, Samiruddin Tarwan, dan Andi Syahrir dengan yang peneliti terdapat persamaan dalam membahas Peranan Perangkat Desa dalam Pelayanan Surat-Menyurat. Sedangkan untuk perbedaannya adalah dalam skripsi yang peneliti adalah peneliti juga menggunakan *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, menggunakan Pasal 26 Ayat 4 Huruf H serta lokasi yang peneliti juga dengan jurnal Musdar, Samiruddin Tarwan, dan Andi Syahrir gunakan untuk penelitiannya.

¹⁹ Andi Syahrir Musdar, Samiruddin Tarwan, "Peranan Perangkat Desa Dalam Pelayanan Surat-Menyurat (Studi Di Desa Pallimae Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana).," *Jurnal SELAMI IPS*, Vol.ume 16 Nomor. 1. (Januari 2023):54.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpul data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.²⁰ Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dari responden melalui wawancara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.²¹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Kepala Desa selaku pemimpin desa sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, aparatur desa selaku pemberi layanan dan masyarakat selaku penerima pelayanan administrasi pada bulan januari.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²² Tetapi melalui sumber lain yang mendukung data dari sumber primer seperti studi kepustakaan, Jurnal ilmiah, Buletin, Al-qur'an, Hadist dan literatur-literatur

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Anatasari Press, 2011), 15.

²¹ Ibid, 13.

²² Ibid, 71.

lainnya yang mendukung tentang penelitian pada judul skripsi ini. Dalam penelitian ini sumber data sekondernya adalah Studi kepustakaan, Jurnal Ilmiah, Al-Qur'an, dan literatur-litelatur pendukung lainnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau gejala/satuan yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Seluruh perangkat desa yang berjumlah 11 orang dan Masyarakat sukananti kecamatan way tenong kabupaten Lampung Barat yang telah melakukan layanan administrasi sebanyak 15 orang pada bulan januari yang membuat surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), Keterangan Lahir, Surat Ijin Ramai-Ramai, Surat Kematian, Surat Domisili.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi.²³ Cara untuk menarik sampel dari populasi dan menentukan sampel penelitian disebut dengan teknik sampling.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan *Teknik Purposive sampling* adalah cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya.²⁴

Pada Penelitian ini sampel yang diambil yaitu Kepala Desa, dua aperatur desa yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan administrasi di Desa, dan 5 masyarakat yang telah melakukan layanan administrasi pada bulan januari.

Jika populasi terlalu besar maka peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada dipopulasi

²³ Ibid., 62.

²⁴ Ibid., 65.

tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Adapun alasan peneliti dalam mengambil sampel kepala desa karena kepala desa merupakan aktor utama dalam jalannya pemerintahan yang terjadi di desa. Adapun dua aperatur desa yang dipilih karena aktor utama yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan administrasi di Desa. Dan 5 masyarakat tersebut sudahlah mewakili masyarakat yang melakukan administrasi lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.²⁵ Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data tentang masyarakat yang melakukan layanan administrasi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.²⁶ Pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan peran kepala desa dalam pelayanan administrasi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip,

²⁵ Ibid., 80.

²⁶ Ibid., 75.

catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, klipng, dan sebagainya.²⁷ Pada peneitian ini peneliti menggunakan berupa arsip mengenai profil desa, surat penelitian dan foto sebagai penunjang penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data sudah terkumpul seperti diatas, maka untuk langkah selanjutnya adalaah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3)menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Dalam hal ini, peneliti harus dituntut memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta kedalaman yang tinggi.²⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-

²⁷ Ibid., 85.

²⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 17 Nomor 33 (Januari 2019): 91, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

d. Simpulan

Dari penjelasan terdahulu, uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data bersifat interaktif dengan analisis data. Jadi, menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah ketika mengumpulkan data.²⁹

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran. Hal ini disebabkan oleh penerapan metode kualitatif, dengan demikian laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara di lapangan, dokumentasi serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰

Penulis juga menggunakan analisis data secara induktif. Metode induktif adalah menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus lalu kepada yang umum. Dan penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab, adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah,

²⁹ Ibid., 4-95.

³⁰ Rahamdi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 13.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *fiqih siyasah*, ruang lingkup *fiqih siyasah*, *siyasah tanfidziyah*, *al sultah tanfidziyah*, pengertian pemerintah desa, peran pemerintah desa, tugas dan fungsi pemerintah desa, Pasal 26 Ayat 4 huruf H nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan Memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, dan Implementasi Pasal 26 ayat 4 huruf H Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang desa.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 4 huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukanananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan Tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implemtasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cangkupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulis skripsi ini, serta adanya rekomendasi dari penulis sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana, karena pemerintah desa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pasal 26 ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peran pemerintah desa dalam melayani masyarakat terkait pengurusan administrasi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Pasal 26 Ayat 4 Huruf H yaitu Pertama Pemerintah desa sebagai fasilitator harus menyediakan sarana dan prasana sebagai fasilitas dalam pelayanan administrasi warga dalam hal ini, pemerintah telah berupaya menyediakan berupa balai desa. Sedangkan fasilitasnya lainnya komputer, printer, hvs, dan sebagainya tersedia dengan lengkap. Kedua Pemerintah desa sebagai mobilisator berperan mengarahkan setiap masyarakat yang ingin mengurus administrasi agar melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Ketiga Pemerintah sebagai regulator berperan memberi arahan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini pemerintah desa menetapkan aturan-aturan yang bersifat membina masyarakat sesuai standar operasional yang berlaku.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana sesuai dengan *siyasa tanfidziyah*. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan

kajian merupakan kajian *fiqh siyasah* dengan ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* yaitu merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam rangka pemberian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukananti Kecamatan Way tenong Kabupaten Lampung Barat sudah melaksanakan Pasal 26 Ayat 4 Huruf H yang mana pemerintah desa sukananti sudah menjalankan perannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan administrasi bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep *siyasah tanfidziyah* sebagai politik pelaksana perundangan-undangan dari kebijakan pemerintah desa yaitu Pasal 26 Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat.

B. Rekomendasi

Skripsi ini penulis rekomendasikan kepada pihak terkait baik dalam rangka meningkatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bagi Masyarakat, sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Sukananti Kecamatan Way tenong Kabupaten Lampung Barat dapat lebih meningkatkan Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Bagi Masyarakat hal ini dikarenakan masih adanya kendala bahwa pemerintah desa belum bisa memanfaatkan secara maksimal teknologi masa kini dalam penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh warga. Sehingga warga tidak perlu bolak-balik kebalai desa untuk memenuhi persyaratan yang ingin melakukan pelayanan administrasi dalam hal surat menyurat sehingga dapat langsung di proses oleh pemerintah desa.
2. Masyarakat harus peka dan paham akan hak dan kewajiban sebagai masyarakat, sehingga dapat menuntut pemerintah desa untuk memberikan pelayanan administrasi yang maksimal sesuai dengan Pasal 26 Ayat 4 Huruf H

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Skripsi ini yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Dalam Implementasi Pasal 26 Ayat Ayat 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat) diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dari peneliti bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan.



DAFTAR RUJUKAN

SUMBER BUKU

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Kairo: *Dar al-Anshar*, 197.

Ahmad, Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintah Desa Perspektif regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2018.

Ash-Shiddieqy, Hasbi T.M., *Pengantar Siyāsah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 8.

HAW, Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.

Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*. *Al Mu'assasah Al-Arabiyah*, 1961.

Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, Jamaluddin, *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator, dan Implementasi*. Bandung: CV Penerbit Qiara Media. 2019.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Antasari Press 2011.

Rauf, Rahyunir, Sri Maulidiah, Pemerintah Desa. Yogyakarta: Nusa Media. 2015.

RI, Departemen Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahan” (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1994), 172.

Qardawi, Yuauif, Min Fiqhi Al-Daulah Fi Al-Islam, Terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Perspektif Al Qur’an Dan Sunnah (Jakarta: Al-Kausar, 1998), 113.

Suhardono, Edy, Konsep Derivasi dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.

Wasisistiano, Sadu, Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Bandung: CV. Indra Prahasta. 2014.

SUMBER JURNAL

Alfian, Yani, “ Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat,” *JISIP*:59.

Apriani, Gradila, Shelly Oktafiyana SR, “Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan,” *Jurnal Fisip*, Volume 19 Nomor 1 (April 2021): 113,
<https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/486>.

Chintary, Valentine Queen, Asih Widi Lestari, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 5 Nomor 2 (Mei 2016): 59-60, www.publikasi.unitri.ac.id.

Dwimawanti, Ida Hayu, “Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah ,” *Jurnal JIAKP*, Volume 1 Nomor 1 (Juli 2004): 112,

<https://eprints.alisongo.ac.id/3684>.

Hakim, Dani Amran dan Norma Setiyana, “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru Lampung Selatan,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (Oktober 2022): 103, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

Higau, Clemen Belly Heden, “Pelaksanaan administrasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanaan Masyarakat Di Desa Metalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 3 (Oktober 2015): 1450-1451, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20%2810-12-15-10-37-57%29.pdf>.

Iraawati, Erni, “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang Nonor 6 Tahun 2014 (Sebuah kajian tentang Otonomi Desa),” *Jurnal: Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2021): 635, <https://stp-mataram-e-journal.id/JIP/article/view/719/588>.

Maraliza, Helma, Kartika S, Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (September 2021): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Nurlia, “Strategi Pelayanan Dengan Konsep Service Excellent,” *Meraja Journal*, Volume 1, Nomor 2 (2018): 17–30, <https://media.neliti.com/media/publications/284682-strategi-pelayanan-dengan-konsep-service-09679416.pdf>.

Putra, Nanda Herijal, “Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab Public Administration In Islamic Perspective: A Study On The

Government System Of Umar Bin Khattab,” *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Volume 8 Nomor 1 (Juni 2021): 18-22,
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/3541/1801>.

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 17 Nomor 33 (Januari 2019): 91,
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Rianti, Selvi, Zaini Rusli, dan Febri Yuliani, “Kualitas Pelayanan Publik,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 15 Nomor 3 (Juli 2019): 414–415,
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/7899/6096>.

Sibaroni, Yulianti, *Aplikasi Pelayanan Administrasi Penduduk Desa Berbasis Web Programing* (Yogyakarta: SNATi, 2015) 1907–5022.

Syahrir, Andi, Musdar, Samiruddin Tarwan, “Peranan Perangkat Desa dalam Pelayanan Surat-Menyurat (Studi di Desa Pallimae Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana Tahun 2022,”) *Jurnal Selami Ips* Vol.16, No1.(Januari2023):54,
https://selami.uho.ac.id/index.php/PPKN_IPS/index

Samsu, La, “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah,” *Jurnal Tahkim*, Volume 13 Nomor 1 (Juni 2017): 155,
<https://jurnaliainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

SUMBER UNDANG-UNDANG

Pasal 26 Ayat (4) Huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 26 Ayat 4 Huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

SUMBER INTERNER/ WEB

Indonesia, Zhamrawut Corps, "Definisi Dan Arti Kata Tinjauan," Kamus Hukum Online Indonesia, 2016, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan/>.

Setiawan, Ebta, "Arti Kata Implementasi," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012, <https://kbbi.we.id/implementasi>.

SUMBER WAWANCARA

Hidayat, Rendi, (Sekretaris Desa), "Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat Di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat," Wawancara Dengan Penulis, 13 Juli 2023.

Hadi, Jamrul, (Warga Desa Sukananti), "Kinerja Aparatur Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Dalam Pelayanan Administrasi dan Hambatannya ," Wawancara Dengan Penulis, 14 Juli 2023.

Mustika, Rika, (Warga Desa Sukananti), "Kinerja Aparatur Desa Sukananti Kecamatan way Tenong Kabupaten Lampung Barat dalam Pelayanan Administrasi dan hambatannya," Wawancara Dengan Penulis, 13 Juli 2023.

Mustika, Eka, (Warga Desa Sukananti), "Kinerja Aparatur Desa

Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dalam Pelayanan Administrasi dan Hambatannya," Wawancara Dengan Penulis, 13 Juli 2023.

Oktasari, Eka, (Warga Desa Sukananti), "Kinerja Aparatur Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dalam Pelayanan Administrasi dan Hambatannya," Wawancara Dengan Penulis, 13 Juli 2023.

Pebriani, Merisa, (Kasie Pelayanan), "Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pelayanan bagi Masyarakat Di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat," Wawancara Dengan Penulis, 13 Juli 2023.

Supriyadi, Eko, (Warga Desa Sukananti), "Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Administrasi Di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat," Wawancara Dengan Penulis, 14 Juli 2023.

Yulizon, Alfi, (Kepala Desa), "Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat Di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat," Wawancara Dengan Penulis, 13 Juli 2023.

SUMBER SKRIPSI

Annisa, Nur, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014).

Mali, Kornelis Ndara, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang" (Skripsi, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2022).

- Panjaitan, Erdipa, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kepala Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2018).
- Susana, Vina, “Peran pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).
- Setiyan, Norma, “Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

